

**DINAMIKA PASCA ARAB SPRING:**  
**MEMBACA POLA "PROXY WAR" DI SURIAH DAN KAWASAN**  
**TIMUR TENGAH**

*Muhammad Syaroni Rofii*

***Abstract***

*The civil war that occurred in Syria shows a humanitarian tragedy in the twenty-first century. This conflict originally was part of a dynamic in democratic transition but turned into a prolonged civil war. It can be concluded that the cause of this tragedy is none other than because of a proxy war involving big countries. In this research, it was found that the failure of peace in Syria is inseparable from the influence of the big powers who use their influence to block any vetos related to Syrian crisis in United Nations. Each external actors attempt to protect their national interests and agendas at the same time reduce universal values. Conflict in Syria involving Rusia on one hand and the United States on other hand. Both countries have different plan toward regime change in Syria which lead to other dimension of proxy war in contemporary world. This article attempted to explore the pattern of proxy war in Syria and its influence toward the stability of the region.*

**Key Words:** Suriah, Perang Sipil, Proxy War, Amerika-Russia

**PENDAHULUAN**

Penyerangan pemimpin ISIS Abu Bakr Al-Baghdadi pada Minggu 27 Oktober 2019 oleh tentara Amerika Serikat menjadi babak baru konflik panjang yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Penyerangan yang disaksikan langsung oleh Presiden AS Donald Trump dari *situation room* di Washington DC tersebut, menurut Donald Trump, merupakan hasil kerja banyak pihak (MSNBC, 27 Oktober 2019). Trump dalam pidatonya pasca serangan yang

disebut mampu melumpuhkan pemimpin ISIS tersebut menyampaikan terima kasih kepada Rusia, Turki, Suriah, Irak dan Kelompok Kurdi Suriah. Dari pidato Trump terdapat sebuah fakta menarik terkait penyebutan secara spesifik kelompok Kurdi sebagai pihak yang membantu misi AS dalam menumpas ISIS di Timur Tengah, khususnya di wilayah Suriah. Kelompok Kurdi yang beroperasi di wilayah Suriah disebut dengan sebutan SDF (Syrian Democratic Forces) merupakan kelompok militer yang dibentuk oleh YPG (Kelompok Pembela Rakyat Kurdi) untuk memperjuangkan terbentuknya sebuah daerah otonomi khusus bagi etnis Kurdi di wilayah Suriah (Aljazeera, 15 Oktober 2019).

Sebelum peristiwa serangan terhadap pemimpin ISIS berlangsung, pemerintah Turki memutuskan melakukan serangan militer ke wilayah Suriah. Dari wilayah perbatasan Akcakale, Turki membombardir wilayah yang dikuasai pasukan SDF dengan menggunakan serangan udara disusul serangan darat dengan bantuan tentara Free Syrian Army (FSA) (Yeni Safak, Oktober 2019; New York Times, 9/10/2919). Serangan militer Turki terjadi tidak lama setelah pasukan Amerika Serikat memutuskan untuk meninggalkan Suriah. Menurut Sekretaris Pertahanan AS, Mark Esper dalam keterangannya kepada CBS News bahwa “Posisi Amerika Serikat sudah tidak tertahan lagi untuk keluar dari Suriah” untuk menjelaskan alasan dibalik keluarnya tentara AS yang berjumlah sekitar 1,000 orang yang selama ini ditugaskan untuk memerangi ISIS dengan mengandeng SDF (Al Monitor, 13/10/2019).

Peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan apa yang terjadi di Suriah dan sekitarnya saat ini. Keterlibatan negara-negara besar dalam konflik bersenjata di Suriah tampak kasat mata. Kendati demikian, negara-negara besar berupaya untuk menghindari konfrontasi langsung dengan negara besar lainnya. Oleh sebab itu maka siklus kekerasan di kawasan ini sangat sulit diurai karena banyaknya tekanan eksternal. Tulisan ini berupaya menganalisa secara mendalam pola konflik yang terjadi di Suriah dan sekitarnya dengan

menggunakan pendekatan kualitatif dan menjelaskan bagaimana perang proxy atau “proxy warfare” terjadi serta pihak-pihak yang terlibat dalam perang proxy.

Pada bagian awal tulisan, dijelaskan tentang sejarah awal Arab Spring yang memiliki dampak langsung bagi Suriah, kemudian dilanjutkan dengan analisa seputar reaksi aktor politik domestik yang tidak memiliki pandangan yang sama tentang transisi menuju demokrasi yang berujung pada konflik bersenjata, ditengah konflik bersenjata yang berkepanjangan aktor internasional terlibat langsung dalam *perang proxy*, terutama Amerika dan Rusia, diikuti oleh aktor kawasan lainnya yang berada dalam posisi berseberangan dalam opsi penciptaan perdamaian di Suriah yang telah memakan korban ratusan ribu jiwa diikuti dengan jutaan pengungsi tersebar di Timur Tengah dan Eropa. Pada bagian akhir menawarkan sejumlah rekomendasi yang perlu untuk diimplementasikan guna mempercepat proses perdamaian di Suriah dan kawasan.

## **Petaka Pasca Arab Spring**

Harus diakui bahwa kelahiran ISIS merupakan akibat dari instabilitas di kawasan Timur Tengah pasca Arab Spring. Kemunculan Al Baghdadi pada bulan Juni 2014 untuk mendeklarasikan diri sebagai khalifah Islamic State of Irak and Syria atau ISIS (sebagian menyebutnya ISIL dan DAESH) memanfaatkan longgarnya keamanan di wilayah Irak dan Suriah. Suriah ketika itu masih mengalami perang saudara antara rezim Bashar Assad dengan kelompok oposisi penentangnya meliputi Free Syrian Army yang menghendaki pergantian rezim secara demokratis. Situasi yang sama juga terjadi di Irak dimana rezim Jalal Talabani belum mampu mengamankan seluruh wilayahnya karena mewarisi struktur keamanan yang ditinggalkan AS dan pada saat yang sama terlibat dalam konflik internal.

Dalam spektrum lebih luas apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini merupakan pengaruh dari dinamika Arab Spring pada penghujung tahun 2010 berupa revolusi yang dilakukan oleh kekuatan rakyat untuk menggulingkan rezim-rezim otoriter di kawasan. Revolusi rakyat yang menghendaki tatanan baru itu berhasil di beberapa negara namun gagal pada sebagian lainnya. Revolusi Arab Spring yang bermula di Tunisia kemudian menginspirasi gerakan rakyat di bagian lain kawasan Timur Tengah mulai dari Mesir, Libya, Yaman, Bahrain dan Suriah (Hamid Dabashi, 2012; Marc Lynch, ed., 2014, 2012).

Tunisia tempat Arab Spring dimulai adalah contoh berhasil gerakan rakyat ini sebab setelah kekuatan rakyat mampu menggulingkan rezim Zinedin Ben Ali, koalisi masyarakat sipil mampu bersatu menjaga stabilitas politik nasional untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung yang lebih demokratis untuk pertama kali sejak merdeka pada tahun 1956. Pada 23 Oktober 2011 rakyat Tunisia memilih secara langsung perwakilan mereka untuk duduk di parlemen yang ketika itu suara mayoritas berhasil diraih oleh partai Ennahda pimpinan Rached Gannouchi (Azzam S. Tamimi, 2001), seorang intelektual berpengaruh Tunisia yang mengasingkan diri di Inggris untuk kembali berjuang bersama rakyat Tunisia, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan presiden pada tahun 2014 yang berhasil membawa Beji Caid Essebsi sebagai presiden untuk periode jabatan lima tahun. Keberhasilan Tunisia melewati masa krisis mendapat apresiasi internasional termasuk lembaga yang konsern dengan isu perdamaian seperti Nobel, memberikan penghargaan bidang perdamaian kepada gerakan sipil Tunisia, National Dialogue, atas keberhasilan mereka menjaga perdamaian dan penguatan demokrasi Tunisia (<http://www.theguardian.com>, 2015). Peran gerakan sipil di Tunisia dianggap penting karena kerasnya konflik politik identitas yang melibatkan kelompok Islamis dan kelompok sekuler, namun setelah gerakan National Dialogue yang diisi oleh aliansi para pekerja profesional, aktifis, penulis, pengacara dan kelompok profesi lainnya,

mendorong konstitusi yang bisa mengakomodasi semua pihak maka Tunisia berhasil keluar dari krisis transisi demokrasi (<https://www.alaraby.co.uk>, 2018).

Berbeda jauh dengan Tunisia, Suriah yang diharapkan mampu melewati masa transisi dari revolusi menuju demokrasi dalam kenyataannya tidak bergerak kemana-mana, aktor politik domestik Suriah terlibat dalam perang saudara, kelompok oposisi yang tadinya berharap mampu melakukan perubahan drastis melalui pemilihan umum mendapat penolakan dari rezim Bashar al-Assad yang lebih memilih menggunakan pendekatan militer yang sangat massif dan repressif untuk meredam gerakan perubahan dari kelompok oposisi. Kelompok oposisi yang sebelumnya berjuang menggunakan cara-cara demokratis lantas berubah menjadi gerakan bersenjata yang dimotori oleh sejumlah perwira tinggi militer Assad yang kemudian menjelma menjadi Free Syrian Army. Sepanjang konflik bersenjata berlangsung, baik kubu Assad maupun oposisi berupaya menggalang dukungan internasional untuk mendapat pengakuan serta legitimasi. Respon internasional terbelah menjadi dua, sebagian konsisten mendukung Assad sementara sebagian lainnya mendukung oposisi.

Dalam kasus konflik Suriah mengacu pada bentuk dukungan yang diberikan maka dapat dipetakan menjadi dua kubu, kubu rezim Assad didukung oleh Rusia dan Iran, sementara kubu oposisi didukung oleh AS, Turki, Uni Eropa dan sebagian anggota Liga Arab. PBB sendiri sejauh ini telah menggelar lebih dari 30 pertemuan membahas isu konflik Suriah akan tetapi selalu mengalami kemandekan karena veto yang dijatuhkan oleh Rusia di Dewan Keamanan PBB (<https://www.securitycouncilreport.org>).

Melihat pola dukungan masing-masing aktor negara terkait isu Suriah maka dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata yang berkepanjangan di Suriah merupakan bentuk proxy war yang melibatkan negara-negara besar. “proxy” menurut Cambridge Dictionary berarti “ authority given to

a person to act for someone else, such as by voting for them in an election”, yaitu memberikan otoritas atau mandat kepada orang lain untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Sementara definisi yang lebih spesifik terkait proxy dalam terminology militer menuurt, Amos C Fox, salah seorang perwira militer AS, proxy war berarti: “security force assistance, working through partners, and working by, with and through” (Amos C. Fox, 2019). Maka dalam konteks politik internasional dapat disimpulkan bahwa padanan kata yang paling tepat untuk konteks bahasa Indonesia untuk proxy adalah “suruhan” atau “boneka” namun cenderung memiliki konotasi negatif. Sementara jika “proxy” diterjemahkan dengan kata “mitra” (partner) atau “sekutu” (*ally*) yang masing-masing memiliki akar sendiri akan mengaburkan makna asal dari proxy. Sehingga penggunaan kata proxy dalam kesempatan ini terlihat lebih tepat.

### **Arab Spring: Menggapai Mimpi Demokratisasi**

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa konflik bersenjata yang terjadi di Suriah hari ini tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa Arab Spring yang terjadi di Tunisia dan kemudian menyebar ke negara-negara sekitarnya. Gerakan rakyat Tunisia yang mampu menggulingkan rezim berkuasa menjadi inspirasi bagi gerakan sosial di Suriah. Pada awalnya gerakan perubahan kelompok oposisi anti-pemerintah menujukkan komitmen perubahan berlangsung secara damai tanpa kekerasan dengan skenario setelah rezim Asad melimpahkan kekuasaanya kepada pihak koalisi nasional maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan secara jujur dan adil dibawah supervise lembaga internasional. Gerakan perubahan di Suriah, seperti halnya di beberapa negara, seperti Tunisia, Libya, Bahrain, Mesir, mendapat dukungan dari negara-negara kawasan termasuk para pemimpin dunia internasional.

Amerika dan Uni Eropa secara terang-terangan menyatakan sikap mendukung gerakan perubahan di Timur Tengah dengan harapan semakin banyak negara demokratis di Timur Tengah maka akan semakin baik bagi

persebaran nilai demokrasi, hak asasi manusia dan tata pemerintahan yang baik di Timur Tengah. Pada periode ini Turki termasuk salah satu negara yang memiliki hubungan baik dengan kelompok pro-demokrasi di Timur Tengah termasuk salah satu yang paling aktif mengkampanyekan agar negara-negara di kawasan Timur Tengah mulai mempertimbangkan demokrasi sebagai norma baru dalam mengelola pemerintahan. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap gerakan perubahan yang diinisiasi oleh rakyat sembari mengecam rezim otoriter yang menggunakan kekerasan untuk meredam aksi anti-pemerintah (Rania Abouzeid, 2016; Ivan Watson and Mohamed Fadel Fahmy, 2016). Pesan Erdogan ketika itu ditujukan kepada para pemimpin Arab. Bahkan pasca keberhasilan gerakan pro-perubahan mampu menggulingkan rezim berkuasa, Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir dan Tunisia untuk memberikan dukungan baik dalam bentuk dukungan moral maupun materi. Gerakan Erdogan mendukung kelompok demokrasi dilihat sebagai intervensi oleh pemerintahan Assad sehingga mulai menjaga jarak dengan Erdogan.

Bashar al-Assad menyadari posisinya akan terancam jika koalisi nasional mampu menggulingkan pemerintah dan memilih pemimpin baru, ketakutan rezim Assad tercemin dari sikapnya yang menolak opsi mundur dari pemerintahan. Sebaliknya, Assad menujukkan respon sangat keras kepada oposisi dengan mengerahkan kekuatan militer untuk menumpas setiap aksi demonstrasi. Reaksi Assad mengerahkan kekuatan militer untuk meredam demonstrasi kemudian mendapat perlawanan dari pihak oposisi. Pihak oposisi nasional yang tergabung dalam Syrian National Coalition (<http://en.etylaf.org/>) merespon pendekatan Assad dengan meminta bantuan pihak internasional untuk melakukan intervensi di Suriah.

Dalam periode perundingan rezim Asad mencoba meyakinkan pihak internasional bahwa isu transisi kepemimpinan di Suriah merupakan isu domestik yang menjadi konsen pemeritahan rezim Asad dan menjanjikan perubahan ke arah demokratisasi secara bertahap. Asad mencoba

menunjukkan komitmennya terhadap demokratisasi dengan penyelenggaran pemilihan umum dalam waktu yang disepakati oleh pemerintah dan oposisi. Namun, dalam kenyataanya periode dialog ini dimanfaatkan oleh rezim Assad untuk melakukan penangkapan terhadap kelompok atau figur anti-pemerintah. Pada akhirnya rezim Assad menyebut kelompok oposisi sebagai teroris yang melakukan perlawanan terhadap negara.

### **Intervensi Aktor Internasional Dan Rivalitas Amerika-Rusia**

Seiring dengan semakin kerasnya sikap rezim Assad terhadap oposisi, Barat mengkritik keras sikap rezim Asad dan meminta rezim ini untuk mempercepat proses demokratisasi, namun anjuran ini diabaikan oleh Assad. Karena mendapat dukungan dari Rusia Assad semakin percaya pada kekuatan militer mereka akan mampu menghabisi kelompok oposisi. Kontak diplomatik antara Suriah dan Rusia begitu intens dalam periode ini mengingat antara Suriah dan Rusia memiliki hubungan strategis yang berlangsung sangat lama baik dalam bidang ekonomi maupun pertahanan.

Seiring dengan semakin kerasnya sikap Assad, Amerika dan Uni Eropa menunjukkan opsi memberikan bantuan senjata kepada oposisi untuk melawan Assad. Sikap ini ditunjukkan oleh anggota parlemen Eropa yang secara terang-terangan mendukung opsi pemberian bantuan senjata kepada kelompok oposisi yang tengah berperang melawan rezim Bashar al Assad. Perancis dan Inggris adalah dua negara anggota Uni Eropa yang mencoba terlibat dalam krisis Suriah dengan cara mengirimkan bantuan kepada kelompok oposisi yang belakangan memiliki sayap militer berupa Tentara Pembebasan Suriah “Free Syrian Army”, bentuk bantuan yang mereka berikan berupa pendanaan dan pelatihan teknis pertahanan dengan mengirimkan pasukan elit yang bisa memberikan pelatihan bagi para tentara oposisi (Martin Chulov, 2012). Amerika juga menggunakan pendekatan serupa dalam merespon perkembangan krisis Suriah. Bagi Amerika dan Eropa ketika Assad bisa dilumpuhkan seperti

pengalaman di Libya maka akan lebih mudah untuk membangun fondasi demokrasi bersama kelompok oposisi.

Ketika tekanan internasional semakin kencang rezim Assad tidak bergeming, upaya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyelesaikan konflik bersenjata di Suriah tidak pernah berhasil terutama di level Dewan Keamanan PBB karena terhambat oleh klasusuk veto yang dimiliki oleh lima negara anggota meliputi Amerika, Rusia, China, Inggris dan Perancis. Rusia adalah pihak yang selalu menolak setiap opsi operasi militer membebaskan rakyat Suriah dari rezim Assad seperti skenario satu dekade sebelumnya ketika koalisi Amerika mengakhiri era Saddam Husein di Irak dengan pendekatan invasi militer. Alih-alih mencabut dukungan pada Assad pemimpin Rusia balik menuduh Barat telah berupaya bertindak seperti pahlawan, padahal mereka memiliki jejak kegagalan ketika melakukan invasi ke Irak pada tahun 2003. Kritik Presiden Rusia Vladimir Putin kepada pemimpin Amerika membuat opsi damai versi PBB hingga hari ini tidak pernah terwujud (Martin Chulov, 2012).

Disela masa damai dan berunding, Rusia tidak sedikitpun mengurangi dukungan kepada rezim Assad bahkan ketika kampanye internasional menguat setelah melihat jumlah korban meninggal dari pihak sipil dan gelombang pengungsi yang membuat dunia tercengang, Assad melakukan kunjungan diam-diam ke Moscow dengan tujuan untuk menegaskan bahwa hubungan antara Suriah dan Rusia tak akan berubah seperti sebelumnya. Seperti diketahui Rusia merupakan partner strategis Suriah baik ketika era Perang Dingin hingga hari ini, hal ini ditegaskan dengan sebagian besar alat persenjataan Suriah merupakan produk Rusia. Jaminan rusia terhadap Suriah ditunjukkan dengan pengiriman elit kemudian diikuti dengan pengiriman jet tempur untuk menghabisi kelompok oposisi yang menurut versi Assad dan putin adalah “teroris” yang harus dihabisi demi stabilitas nasional Suriah. Pengiriman bantuan senjata dan pasukan dari Rusia kepada suriah

juga untuk menegaskan bahwa Suriah merupakan garda terakhir pertahanan rusia.

Rusia memiliki pangkalan militer di Latakia (perairan Laut Mediterania), dan menjadi salah satu pusat pertahanan Rusia di Timur Tengah, bagi Rusia keberadaan rezim Assad sangat membantu bagi kelanjutan strategi pertahanan global rusia di Timur Tengah. Pergantian rezim apalagi yang anti terhadap Rusia akan berdampak sangat serius bagi masa depan pertahanan Rusia (Yossef Bodansky, 2015). Lebih dari itu, Rusia dalam lima tahun terakhir tengah mengembalikan citra sebagai negara yang disegani baik dalam militer maupun ekonomi hal ini terefleksi dari manuver Rusia di wilayah Uni Eropa berupa pengambil alihan wilayah Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Dari sisi strategi, Crimea seperti halnya Latakia di Suriah memiliki fungsi vital bagi pertahanan Rusia di kawasan Laut Hitam.

### **Pecahnya Konflik Identitas Kawasan**

Gerakan oposisi anti Assad ketika didirikan ditujukan untuk mempercepat proses demokratisasi di Suriah, namun gerakan yang diinisiasi oleh figur-firug moderat dengan latar belakang beragam mulai dari kalangan intelektual, tokoh agama, tokoh gerakan, hingga para aktifis yang memiliki jaringan dengan Barat, namun gerakan oposisi ini gagal mendapat jaminan demokratisasi dari rezim Assad. Upaya mereka menekan rezim Assad untuk menerapkan demokrasi di Suriah gagal karena rezim Assad menggunakan isu sektarianisme untuk mendeligitimasi kelompok oposisi.

Assad mengidentifikasi diri sebagai rezim Syiah yang memiliki hubungan baik dengan Iran. Hubungan mereka tidak sebatas solidaritas imajiner antar penganut syiah dengan Ayatollah Khameini di Iran. Hubungan mereka lebih jauh meliputi isu politik, militer, dan ekonomi. Penggunaan isu sektarianisme dengan mengankat identitas Syiah menjadi pemicu konflik ideologis, antara

Syiah-Sunni (USIPeace Briefing, Mei 2007; Jubin M. Goodarzi, 2013). Penggunaan sentimen Sunni-Syiah dalam jangka pendek sangat efektif untuk menjaga agar Assad tetap bertahan dan mendapat dukungan dari rezim-rezim Syiah di kawasan timur tengah, termasuk milisi Syiah seperti Hizbulah di Libanon. Sementara kelompok oposisi dianggap sebagai representasi kelompok Sunni yang harus dibatasi gerakan politiknya agar tidak mengulangi kesalahan seperti di Irak era Saddam Husein dimana ketika kelompok Sunni berkuasa maka kelompok syiah akan menjadi kelompok terpinggirkan dan tertekan.

Sentimen ini juga membuat pemimpin religius terlibat dalam konflik. Assad mendapat dukungan dari milisi Syiah. Sementara kelompok oposisi mendapat dukungan dari milisi Sunni. Dari konflik inilah gerakan Islamic State of Irak and Levent (ISIL) yang kemudian lebih populer dengan sebutan ISIS. ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakr Al Baghdadi memanfaatkan kondisi ini untuk membangun fondasi gerakan mereka. Kendati gerakan mereka dideklarasikan di kota Mosul, Irak, namun arah gerakan ISIS adalah untuk membantu perlawanan rakyat Suriah melawan rezim Assad yang dipersepsikan sebagai kubu Syiah yang harus diperangi. Situasi yang terjadi di Suriah menjadi ladang subur tumbuhnya gerakan kelompok ISIS yang memang memanfaakan situasi krisis di Suriah, Irak dan Libanon sebagai ladang pertempuran dan ajang untuk mencari eksistensi diantara para kelompok ekstrimis. Kelompok ISIS memanfaatkan destabilisasi di kawasan ini untuk terus melebarkan pengaruhnya ke wilayah-wilayah yang sangat strategis baik dari sisi ekonomi maupun militer.

Kelompok lain, Jabhah an Nushra juga masuk dalam kategori kelompok Sunni yang mengumandangkan perlawanan melawan rezim Assad. Kelompok ini memiliki afiliasi dengan Al Qaeda yang memiliki agenda untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Assad demi menyelamatkan warga sipil. Sentimen anti-Assad digunakan untuk menarik simpatisan dari berbagai wilayah di Timur Tengah atau seluruh penjuru dunia. Namun dalam kenyataanya antara ISIS

dan Jabhah an-Nusra tidak memiliki kerangka berpikir dan pendekatan yang sama dalam perlawanan terhadap Assad sehingga tidak heran ketika dua kelompok ini sering berbeda dalam setiap aksinya (Hassan Hassan, 2016).

Setelah ISIS dan an Nusra, kelompok lain yang terlibat dalam konflik di Suriah adalah kelompok milisi Kurdi, jika ISIS dan Nusra memiliki agenda ideologis berupa perjuangan untuk membebaskan kelompok Sunni dari agresivitas rezim Assad, kelompok Kurdi memiliki agenda lain dalam jangka panjang hendak membentuk negara otonom baru yang bisa menjadi rumah bagi kelompok Kurdi yang tersebar di beberapa negara. Milisi Kurdi menggunakan momen krisis di kawasan ini untuk menunjukkan eksistensi kepada pihak internasional bahwa mereka memiliki kemampuan militer yang bisa didukung untuk menumpas gerakan ISIS. Milisi Kurdi memiliki kedekatan dengan rezim Assad, hal ini terlihat dari sikap milisi Kurdi yang mengkampanyekan perjuangan melawan kelompok ISIS dan An Nusra di wilayah Suriah dan sekitarnya. Hal ini ditegaskan pula oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang menyebut bahwa dukungan internasional harus diarahkan kepada pemerintah yang saat ini berkuasa (Assad) dan milisi Kurdi yang serius untuk menumpas gerakan teroris di Suriah (Marina Koren, 2016).

Karakter gerakan milisi di Timur Tengah yang memiliki akses terhadap senjata merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindarkan sehingga konflik-konflik kekerasan di kawasan ini sangat rentan untuk pertumpahan darah. Kelahiran kelompok milisi di kawasan ini tidak lepas dari konflik panjang yang melibatkan negara-negara di kawasan yang mengendepankan pendekatan ideologis dalam setiap terjadi konflik. Keberadaan mereka hingga saat ini lantas membuat opsi perang proxy menjadi salah satu opsi logis untuk negara-negara besar yang memang sedang terlibat dalam rivalitas penciptaan tatanan baru di Timur Tengah pasca pengurangan pengaruh Amerika Serikat di era presiden Barack Obama.

## **Analisa Perang “Proxy” Dalam Konflik Suriah**

Perang “proxy” merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh negara-negara besar yang terlibat dalam rivalitas, terutama pada era Perang Dingin (Tyrone L. Groh, 2010). Yaacov Barsimantov menggunakan definisi perang proxy sebagai perang yang terjadi antar negara di sebuah kawasan sebagai pengganti dari konfrontasi langsung negara superpower (negara besar) (Yaacov Barsimantov, 1984). Kendati Perang Dingin telah berakhir namun bukan berarti negara-negara besar meninggalkan pendekatan perang proxy untuk memperkuat pengaruh di kawasan, dalam isu Suriah Jon B. Alterman, seorang peneliti CSIS, secara spesifik menyebut bahwa konflik bersenjata pasca Arab Spring yang terjadi di Suriah saat ini adalah perang “proxy” yang melibatkan banyak aktor, mulai dari negara hingga aktor non-negara dalam pola yang begitu rumit (Jon B. Alterman, 2013).

Sebelum menjelaskan tentang pola perang proxy yang terjadi pasca Perang Dingin terutama yang terjadi di Suriah saat ini, kita perlu melihat kembali latar belakang perang proxy dan alasan negara menggunakan pendekatan ini. Terdapat empat alasan utama dibalik penggunaan strategi ini. Pertama, dimensi Perang Dingin menjadi latar belakang utama mengapa perang proxy terjadi, negara besar yang terlibat dalam perang dingin, seperti Amerika dan Uni Soviet menghindari konfrontasi langsung menggunakan senjata nuklir (Clive Jones dan Sergio Catigmani, 2012), sehingga negara-negara ini memilih menggunakan "proxy" atau bisa disebut "boneka" untuk mencapai tujuan. Perang Arab-Israel menunjukkan posisi Amerika dan Uni Soviet dalam dukungan berbeda. Begitu juga dengan perang Indo-Pakistan era 1960an dan 1970an. Dukungan tidak hanya berlaku untuk negara, bisa juga dalam bentuk dukungan kepada non-negara, biasanya kelompok separatis.

Kedua, pertimbangan *security dilemma*, untuk mengantisipasi pengaruh negara rival maka satu-satu cara untuk membendung pengaruh rival adalah dengan memberikan dukungan kepada negara mitra, seperti rivalitas Iran dan

Saudi Arabia di Yaman, keduanya memberikan dukungan secara diam-diam kepada pihak berbeda: Arab saudi mendukung pemerintahan berkuasa sementara Iran mendukung pemberontak Houti.

Ketiga, menjaga citra internasional, negara-negara besar seperti Amerika dan Rusia menghindari untuk terlibat langsung dalam konflik yang terjadi di sebuah negara dengan pertimbangan untuk menjaga citra pemerintah di level domestik dan level internasional, pemerintah Amerika tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata di Suriah karena publik Amerika melihat perang hanya membawa dampak negatif bagi Amerika seperti perang irak, sehingga kebijakan Obama menarik pasukan dari Irak dan Afghanistan adalah reaksi atas ketidakpuasan publik, sementara untuk level internasional negara-negara ingin menunjukkan diri sebagai aktor yang menghargai hukum internasional, menghargai mekanisme lembaga internasional seperti PBB dengan Dewan Keamanan PBB, dan pertimbangan diplomatik lainnya. Menggunakan pendekatan "proxy" untuk mencapai tujuan dianggap lebih efektif untuk menjaga citra pemerintah atau aktor negara.

Keempat, dari sisi biaya (Tyrone L. Groh, 2010), biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proxy jauh lebih murah jika terlibat langsung dalam konflik bersenjata, hal ini biasanya ditujukan di negara -negara yang sedang mengalami masa transisi, negara besar memiliki dua pilihan bersama pemerintah atau oposisi, dan akan mensuplai setiap kebutuhan proxy bisa berbentuk biaya dan senjata.

Empat alasan di atas setidaknya bisa menjadi dasar untuk menarik kesimpulan tentang perang proxy yang terjadi di Suriah. Bahwa saat ini Suriah tengah menjadi pembahasan utama para pemimpin internasional karena perang sipil yang melibatkan pemerintah dan oposisi telah menciptakan destabilitas di kawasan. Menurut catatan PBB jumlah korban dari perang sipil di Suriah telah mencapai 400 ribu jiwa diikuti dengan jumlah pengungsi yang mencapai 4,843,126

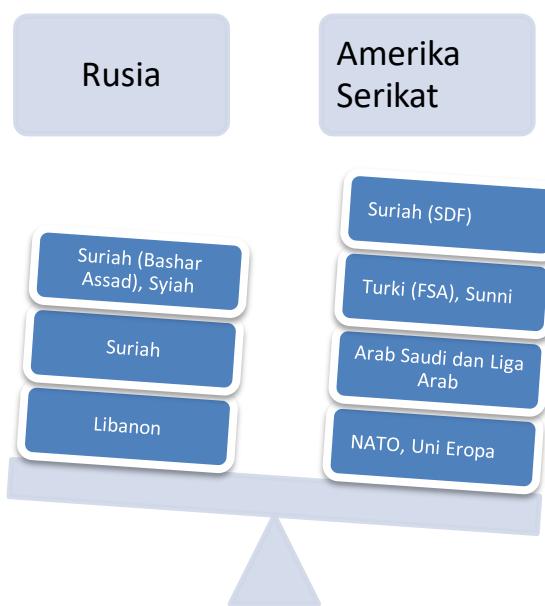
(<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.phpm>) jiwa dan tersebar di beberapa negara di Timur Tengah termasuk yang menyebrang hingga Eropa.

Perang proxy yang terjadi di Suriah tidak lagi disebabkan oleh upaya meminimalisir kemungkinan konfrontasi langsung antara Amerika dan Rusia dengan menggunakan senjata nuklir yang mereka miliki, namun lebih karena faktor pertimbangan strategi pertahanan di kawasan, bagi Rusia Suriah merupakan mitra strategis di kawasan terutama dengan rezim Bashar al Assad sementara Amerika dalam sejarahnya tidak menempatkan Suriah sebagai prioritas untuk strategi pertahanan, akibatnya ketika terdapat kewajiban di lembaga PBB untuk memperjuangkan nasib Suriah Amerika mendapat hambatan dari Rusia. Dua negara memiliki proxy (David A. Patten, 2011) sendiri dalam kasus Suriah, di satu sisi Rusia mendukung secara terbuka perlunya memperkuat rezim Bashar Al Assad dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas dan menghabisi kelompok ISIS, di sisi lain Amerika dan sekutunya berada di sisi kelompok oposisi yang belakangan menggunakan senjata untuk bertahan di wilayah-wilayah yang masih bisa mereka jadikan sebagai basis untuk menunjukkan eksistensi mereka.

Perang proxy di Suriah terjadi tidak lepas dari doktrin pemerintahan Barack Obama yang cenderung menghindari konfrontasi dengan rival-rivalnya seperti dengan Rusia di kawasan Eropa dan Timur Tengah dengan China untuk kawasan Asia Pasifik. Pemulangan pasukan Amerika dari Timur Tengah menjadi sinyalemen kuat perubahan doktrin politik luar negeri Amerika sebelum dan sesudah rezim Obama. Apalagi Barack Obama telah memasuki periode akhir kepemimpinan mencoba meminimalisir kesalahan dalam pengambilan kebijakan luar negeri terkait isu internasional, oleh karena itu, guna menjaga citra pemerintah yang dipersepsikan sebagai rezim yang meninggalkan warisan baik bagi Amerika, Obama lebih memilih menggunakan "proxy" di kawasan untuk merespon perkembangan isu Suriah. Opsi militer akan diambil ketika lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB memberikan persetujuan, namun dalam kenyataannya resolusi Dewan

Keamanan PBB tidak memberikan ruang untuk intervensi militer di Suriah karena mendapat penolakan dari Rusia. Amerika dan sekutu telah mengidentifikasi proxy yang bisa didorong untuk menyelamatkan transisi demokrasi di Suriah pasca Arab Spring, dalam hal ini National Coalition yang memiliki sayap militer Free Syrian Army, dengan memberikan pelatihan militer dan dukungan lainnya, sementara Rusia sejak awal telah menunjukkan posisi mereka berada dibelakang rezim Assad.

**Gambar 1. Pola Aliansi Negara-negara Dalam Perang Proxy di Kawasan Timur Tengah**



## **Penutup**

Perang sipil yang terjadi di Suriah pasca Arab Spring boleh jadi merupakan potret kelam bencana kemanusiaan Abad 21. Jumlah korban yang mencapai angka 400 ribu jiwa disusul jumlah pengungsi yang mencapai angka

5 juta jiwa sudah cukup untuk menjelaskan betapa buruknya perang sipil yang terjadi di Suriah. Dalam perang sipil di Suriah sejumlah negara terlibat, termasuk negara besar, sehingga menjadikan upaya damai untuk membangun kembali Suriah menjadi semakin sulit. Aktor domestik Suriah, baik rezim Assad atau kelompok oposisi, telah memiliki *roadmap* berbeda dalam melihat masa depan Suriah sehingga sangat sulit untuk dipertemukan kembali. Situasi ini semakin rumit ketika aktor non-negara, terutama kelompok teroris yang memanfaatkan destabilitas untuk membangun eksistensi di kawasan. Keberadaan kelompok teroris telah memecah konsentrasi para pemimpin negara terkait pencarian solusi untuk Suriah.

Kini, setelah hampir satu dekade pasca Arab Spring tidak ada tanda-tanda krisis kemanusiaan ini akan berakhir, negara-negara di kawasan telah menunjukkan sikap psimis tentang masa depan perdamaian di Suriah dan kemungkinan semakin memburuknya situasi di kawasan karena antara satu negara dengan negara lainnya terlibat dalam perang proxy yang dimainkan oleh Amerika dan Rusia. Negara-negara di kawasan terutama yang masih menggunakan sistem monarki yang tadinya melihat demokratisasi sebagai harapan alternative kini menutup kembali kemungkinan transisi menuju demokratisasi setelah melihat gagalnya sejumlah eksperimen di Suriah, Mesir dan Libya. Negara-negara ini gagal mencapai titik dimana demokratisasi seharunya. Mereka justru tertahan sebagai negara gagal yang sedang mencari keseimbangan.

Untuk kasus Suriah, tak ada opsi lain yang bisa diambil untuk menghentikan krisis kemanusiaan ini kecuali meminta lembaga PBB untuk terlibat aktif mengawal transisi pemerintahan di Suriah, para pemimpin dunia bisa menggunakan pengalaman rekonsiliasi kasus Bosnia Herzegovina yang merupakan pecahan Yugoslavia pada era 1990an dimana negara ini jatuh ke dalam jurang perang etnis dan memakan korban ratusan ribu jiwa. Perang Bosnia yang ketika itu dikategorikan telah menjurus kepada genosida berhasil diakhiri setelah para pemimpin Bosnia, Kroasia dan Serbia bertemu di Dayton,

Ohio, Amerika Serikat. Keberhasilan perundingan yang dikenal dengan Dayton Accords itu tidak lepas dari peran para pemimpin Amerika, Eropa dan para pihak yang terlibat dalam konflik. Jika konflik Bosnia bisa diatasi dengan pendekatan perundingan, maka krisis Suriah juga sudah seharusnya bisa menggunakan pendekatan serupa untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih buruk.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alterman, Jon B., "The Age of Proxy Wars", Center for Strategic and International Studies, Middle East Program, May 2013.
- Bar-Siman-Tov, Yaakov, "The Strategy of War by Proxy", *Cooperation and Conflict*, xix (1984), 263-273.
- Bodansky, Yossef, *Russia, Syria, and the Crossroads of Strategic Development*, ISPSW Strategy Series, Issue No. 378 Sep 2015.
- Dabashi, Hamid, *The Arab Spring: The End of Postcolonialism* (New York: Zed Books, 2012)
- Goodarzi, Jubin M., "Syria and Iran: Alliance Cooperation in a Changing Regional Environment", *Ortadoğu Etütleri*, Volume 4, No 2, January 2013.
- Groh, Tyrone L., *War on the Cheap? Assessing the Costs and Benefits Of Proxy War* War On The Cheap? Assessing The Costs And Benefits Of Proxy War, PhD Thesis, Georgetown University, 2010.
- Fox, 2019, Amos C., Conflict and the Need for a Theory of Proxy Warfare, *Journal of Strategic Security*, Vol. 12, No. 1 (2019), pp. 44-71 (30 pages).
- Lynch, Marc, *The Wave of Protest that Toppled Status Quo and Struggle for the New Middle East* (New York: Public Affairs, 2012).

Lynch, Marc, ed. *The Arab Uprising Explained: New Contentious Politics in the Middle East* (Columbia: Columbia University Press, 2014).

Tamimi, Azzam S., *Rachid Ghanouchi: A Democrat Within Islamism (Religion and Global Politics)* (Oxford: Oxford University Press, 2001).

Patten, David A., *Using Small Powers To Great Effect: How States Use Insurgent Proxies To Achieve Foreign Policy Goals*, PhD Thesis, Georgeton University, Washington DC, 2011.

Hassan, Hassan, "Is it possible that Al Nusra and ISIL will join forces?", 17 April 2016, dalam <http://www.thenational.ae/opinion/comment/is-it-possible-that-al-nusra-and-isil-will-join-forces>, akses 16 Mei 2016.

<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.phpm>, akses 16 Mei 2016.

<http://en.eticaf.org/about-us/goals.html>

Ivan Watson and Mohamed Fadel Fahmy, "Turkish prime minister arrives for visit to Egypt as role widens", CNN, 14 September 2011 dalam <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/09/12/turkey.diplomacy/>, akses 16 Mei 2016.

Jones, Clive dan Sergio Catigmani, *Israel and Hezbollah: An Asymmetric Conflict in Historical and Comparative* (New York: Routledge, 2012).

Koren, Marina, "Putin's Syria Gambit" The Atlantic, 28 September 2015, dalam <http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/putin-russia-syria-united-nations/407716/>, akses 16 Mei 2016.

Martin Chulov, "France funding Syrian rebels in new push to oust Assad" 7 Desember 2012, dalam <http://www.theguardian.com/world/2012/dec/07/france-funding-syrian-rebels>, akses 16 Mei 2016.

Rania Abouzeid, "Why Turkey's Erdogan Is Greeted like a Rock Star in Egypt Why Turkey's Erdogan Is Greeted like a Rock Star in Egypt", Time, 13 September 2011 dalam <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2093090,00.html>, akses 16 Mei 2016;

"EU May Provide Training to Syrian Rebels" Der Spiegel, 4 Maret 2013, dalam <http://www.spiegel.de/international/europe/the-eu-is-set-to-support-syrian-rebels-with-military-training-a-886794.html>, akses 16 Mei 2016.

“Syria’s Alliance with Iran” USIPeace Briefing, Mei 2007;

“Tunisian national dialogue quartet wins 2015 Nobel peace prize” The Guardian, 9 October 2015, “, dalam <http://www.theguardian.com/world/2015/oct/09/tunisian-national-dialogue-quartet-wins-2015-nobel-peace-prize>, diakses pada 10 Mei 2016.

“14,000 FSA soldiers deployed ahead of imminent Turkish op in Syria” <https://www.yenisafak.com/en/news/14000-fsa-soldiers-deployed-ahead-of-imminent-turkish-op-in-syria-3502364>, diakses 28 Oktober 2019.

“Trump claimed ISIS leader 'whimpered' in final moments. Top officials don't know where he got that detail”, <https://edition.cnn.com/2019/10/29/politics/trump-baghdadi-whimpering-confusion/index.html>, diakses 28 Oktober 2019.

“Trump thanks Russia, Turkey, Syria, Iraq, and Kurds for helping kill Baghdadi”, <https://www.msnbc.com/am-joy/watch/trump-thanks-russia-turkey-syria-iraq-and-kurds-for-helping-kill-baghdadi-72137797686>, diakses 28 Oktober 2019.

<https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/syria/>